

**PERJANJIAN KINERJA ESELON II
BAKESBANGPOL PROV. SULTENG
TAHUN 2024**



**BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Drs. A r f a n, M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. Rusdy Mastura**

Jabatan : Gubernur Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, **29** April 2024



PIHAK PERTAMA,
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. A R F A N, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya penerapan hasil pembinaan kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	77,10 (Indeks)

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 3,483,749,575	APBD
2. Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp 94,409,648,300	APBD
3. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp 898,899,950	APBD
4. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 2,315,899,750	APBD
5. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp 248,375,225	APBD
6. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 10,433,966,744	APBD

Palu, 29 April 2024

PIHAK KEDUA,
 GUBERNUR SULAWESI TENGAH



H. Rusdy Mastura
H. RUSDY MASTURA

PIHAK PERTAMA,
 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. Arfan, M.Si
Drs. ARFAN, M.Si

**PERJANJIAN KINERJA ESELON III
BAKESBANGPOL PROV. SULTENG
TAHUN 2024**



**BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **I Wayan Yudana, AP, M.Si**

Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. A r f a n, M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



PIHAK KEDUA,

Drs. A r f a n, M.Si

Palu, 12 Juni 2024

PIHAK PERTAMA,

I WAYAN YUDANA, AP, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Program/keg/sub.keg	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Sasaran Program Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks RB Perangkat Daerah	68,50
	Sasaran Kegiatan 1. Meningkatkan Kualitas perencanaan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan	Nilai SAKIP Perangkat daerah	80
	Sasaran Sub. Kegiatan - Tersusunnya dokumen renja - Tersusunnya laporan RKPD - Tersusunnya dokumen RKA - Tersusunnya dokumen DPA - Tersusunnya dokumen RKA-P - Tersusunnya dokumen DPA-P - Tersusunnya dokumen Peta Proses Bisnis - Tersusunnya dokumen Manajemen Resiko - Tersusunnya dokumen Lakip - Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Terevaluasinya Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah dokumen renja - Jumlah laporan RKPD - Jumlah Dokumen RKA - Jumlah dokumen DPA - Jumlah dokumen RKA-P - Jumlah dokumen DPA-P - Jumlah dokumen Peta Proses Bisnis - Jumlah dokumen Manajemen Resiko - Jumlah dokumen Lakip - Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen 1 laporan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 laporan 1 laporan
	Sasaran Kegiatan 2. Meningkatkan Profesionalisme ASN Perangkat Daerah 3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik perangkat daerah 4. Meningkatkan pengawasan kearsipan internal perangkat daerah 5. Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) 6. Meningkatkan Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah 7. Meningkatkan pemanfaatan layanan pengadaan barang & Jasa secara elektronik Perangkat Daerah 8. Meningkatkan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah Indeks pelayanan publik (IPP) Perangkat Daerah Tingkat digitalisasi arsip perangkat daerah TLHP BPK dan APIP Perangkat Daerah Tingkat pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah Indeks Tata kelola PBJ Perangkat Daerah Tingkat Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 60 62 60 60 60 60

PROGRAM/KEG/SUB.KEG	ANGGARAN	KETERANGAN
I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 11,658,346,217	APBD
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 382,623,200	
- Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Kegiatan Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 18,773,300	
- Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp. 71,082,800	
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 292,767,100	
2. Kegiatan Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	Rp. 107,470,275	
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 552,604,856	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 285,825,933	
5. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 8,837,167,603	

6. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp.	105,490,750
7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	690,353,600
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	696,810,000

Palu 12 Juni 2024

PIHAK KEDUA
 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK DAERAH
 PROVINSI SULAWESI TENGAH



Dr. ... A N, M.Si

PIHAK PERTAMA
 SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK DAERAH
 PROVINSI SULAWESI TENGAH

I WAYAN ZUDANA, AP, M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Kristo Suryanto Tumakaka, S.Sos**
Jabatan : Kepala Bidang Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. A r f a n, M.Si**
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**
Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Palu, 12 Juni 2024
PIHAK PERTAMA


KRISTO SURYANTO TUMAKAKA, S.Sos

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

(1)	Sasaran Program/Keg/Sub. Keg (2)	Indikator Kinerja (3)	(4)
I	SASARAN PROGRAM Meningkatnya literasi Politik bagi Masyarakat	persentase kelompok masyarakat yang meningkat literasi politik	60%
	SASARAN KEGIATAN 1. Meningkatnya pemahaman politik masyarakat	1. Persentase meningkatnya pemahaman politik bagi parpol 2. Persentase meningkatnya pemahaman politik bagi Ormas 3. Persentase meningkatnya pemahaman politik bagi Pemilih pemula	60% 60% 60%
	SASARAN SUB. KEGIATAN - Tersosialisasinya peraturan perUndang-Undangan bidang politik bagi Partai Politik - Tersosialisasikannya Pemantapan Etika Budaya Politik bagi Partai Politik, dan Kelompok Masyarakat	- Jumlah peserta sosialisasi Peraturan PerUndang-Undagan Bidang politik bagi Partai Politik - Jumlah Peserta sosialisasi Pemantapan Etika budaya politik bagi Partai Politik dan Kelompok Masyarakat	40 orang 150 orang
	SASARAN KEGIATAN 1. Meningkatnya pemahaman peran perempuan dalam politik	1. Persentase meningkatnya pemahaman politik bagi organisasi dan kelompok perempuan	60%
	- Tersosialisasikannya Pendidikan Politik bagi Organisasi/Kelompok Perempuan - Terpenuhinya Kebutuhan pendanaan Partai Politik - Terpenuhinya Kebutuhan pendanaan Pelaksanaan Pemiluakada - Termonitoringnya dan terevaluasinya situasi perkembangan politik daerah Kab/Kota	- Jumlah Peserta Organiasi/Kelompok Perempuan yang mendapatkan sosialisasi pendidikan politik - Jumlah partai politik penerima bantuan Keuangan - Jumlah lembaga penerima dana hibah penyelenggaraan pemiluakada - Jumlah Kab/kota yang dimonitoring dan evaluasi	180 org 11 parpol 4 lembaga 13 kab/kota


PROGRAM/KEGIATAN/SUB.KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I Program Peningkatan peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp. 63,502,566,450	APBD
1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi Politik.	Rp. 63,502,566,450	
- Sub. Kegiatan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp. 449,968,550	
- Sub. Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Rp. 235,562,700	
- Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Sub. Kegiatan Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Rp. 62,448,360,800	
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Rp. 368,674,400	

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA



F. A. N, M. Si

Palu, 12 Juni 2024
 KEPALA BIDANG POLITIK


 KRISTO SURYANTO TUMAKAKA, S.Sos



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Rustam Aripuddin, S.Ag, M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. A r f a n, M.Si**
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua Pihak Pertama** berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



PIHAK KEDUA

Drs. A R F A N, M.Si

Palu, 12 Juni 2024
PIHAK PERTAMA

RUSTAM ARIPUDDIN S.Ag, M.Si

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Program/Keg/Sub.Keg	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	<i>Sasaran Program</i> Meningkatnya Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Masyarakat	persentase masyarakat yang mendapatkan layanan pembinaan Ideologi Pancasila dan wasbang	60%
	<i>Sasaran Kegiatan</i> Meningkatnya kualitas pembinaan ideologi dan wasbang	Persentase SMA/SMK, Perguruan Tinggi dan Organisasi Kepemudaan yang terbina ideologi dan wasbang	60%
	<i>Sasaran Sub.kegiatan</i> - Terlatihnya Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi - Terbinanya masyarakat dalam rangkaian peringatan hari bela negara - Tersosialisasinya penguatan dan pemantapan ideologi pancasila terhadap generasi muda - Tersosialisasinya Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pengembangan Karakter Bangsa terhadap generasi muda - Terevaluasinya Pelaksanaan Program Penguatan Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan di Kab/Kota	Jumlah Pelajar yang terseleksi dan diberikan pelatihan pasukan pengibar bendera pusaka Jumlah masyarakat yang mengikuti rangkaian peringatan hari bela negara jumlah peserta generasi muda yang mendapatkan sosialisasi penguatan dan pemantapan ideologi pancasila Jumlah peserta generasi muda yang mendapatkan sosialisasi Pendidikan Wawasan Kcbangsaan dan Pengembangan Karakter Bangsa Jumlah Kab/Kota yang di evaluasi	56 orang 100 orang 60 orang 60 orang 4 kab/kota
	<i>Sasaran Kegiatan</i> Meningkatnya kualitas pembinaan ideologi dan wasbang	Persentase Kelurahan yang terbina ideologi dan wasbang	60%
	<i>Sasaran Sub. Kegiatan</i> - Tersosialisasinya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengamalan pancasila dan penumbuhan karakter keluarga	Jumlah keluarga yang diberikan penguatan pentingnya kesadaran ideologi pancasila	10 kelurahan

PROGRAM/KEGIATAN/SUB.KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 3,665,727,925	APBD
1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 3,665,727,925	
- Sub. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp. 3,106,372,750	
- Sub. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp. 179,040,350	
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp. 141,430,900	

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Rp. 197,278,050
- Sub Kegiatan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga melalui peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua Aspek kehidupan bermasyarakat, Berbangsa, dan

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



ESPERE AN, M.Si

Palu, 12 Juni 2024
KEPALA BIDANG IDEOLOGI
DAN WAWASAN KEBANGSAAN

RUSTAM ARIPUDDIN, S.Ag, M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Andi Musdalifah, S.Pd. SH. M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Kewaspadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. A r f a n, M.Si**
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**
Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Palu, 12 Juni 2024
PIHAK PERTAMA

ANDI MUSDALIFAH, S.Pd. SH. M.Si

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Program/Keg/Sub.Keg	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	<i>Sasaran Program</i> Meningkatnya kewaspadaan daerah	Persentase peningkatan kewaspadaan daerah dalam pencegahan konflik sosial	100%
	<i>Sasaran Kegiatan</i> Meningkatnya kualitas pembinaan kewaspadaan daerah	Persentase peningkatan perangkat aparatur dan tokoh masyarakat yang terbina kewaspadaan daerahnya	100%
	<i>Sasaran Sub.Kegiatan</i> <ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya rekomendasi pemantapan kewaspadaan dan penanganan konflik sosial - Tersusunnya rekomendasi pemantauan orang asing dan lembaga asing di daerah (tim POALA) - Tersosialisasinya peningkatan kewaspadaan di wilayah perbatasan bagi aparatur, aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda - Tersosialisasi upaya pencegahan potensi konflik sosial menjelang pemilukada serentak - Tersusunnya laporan pelaksanaan rapat Forum Pimpinan daerah provinsi (Forkopimda) - Terdatanya perkembangan situasi dan kondisi kab/kota di Sulawesi Tengah - Tersedianya dokumen rencana aksi daerah penanganan konflik sosial (RAD-PKS) tahun berjalan - Terevaluasinya pelaksanaan RAD PKS tingkat Prov.Sulteng - Tersusunnya kesepakatan tim terpadu pencegahan dan penanganan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme (RAD-PE) - Tersusunnya kesepakatan tim terpadu pencegahan paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah rekomendasi pemantapan kewaspadaan dan penanganan konflik sosial Jumlah rekomendasi pemantauan orang asing dan lembaga asing di daerah (tim POALA) Jumlah aparatur dan aparat keamanan serta para tokoh yang mengikuti rapat sosialisasi peningkatan kewaspadaan di wilayah perbatasan Jumlah peserta sosialisasi Jumlah laporan pelaksanaan rapat Forum Pimpinan daerah provinsi (Forkopimda) Jumlah dokumen data perkembangan situasi dan kondisi kab/kota di Sulawesi Tengah Jumlah dokumen RAD-PKS Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan RAD PKS Jumlah laporan hasil rapat TIMDU RAD-PE Jumlah laporan hasil rapat TIMDU pencegahan paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 75 orang 75 orang 4 laporan 13 dokumen 1 dokumen 3 laporan 1 Dokumen 3 laporan

PROGRAM/KEGIATAN/SUB.KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 1,621,968,000	APBD
I. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp. 1,621,968,000	
- Sub. Kegiatan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. 133,038,750	
- Sub. Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	Rp. 142,529,750	

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Rp. 915,491,500
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. Rp. 193,959,700
- Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. Rp. 236,948,300

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. A R F A N, M.Si

Palu, 12 Juni 2024
KEPALA BIDANG KEWASPADAAN

ANDI MUSDALIFAH, S.Pd. SH. M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Dody Setiawan, S.STP., M.AP**
Jabatan : Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. A r f a n, M.Si**
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**
Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Drs. A R F A N, M.Si

Palu, 12 Juni 2024
PIHAK PERTAMA

DODY SETIAWAN, S.STP., M.AP

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Program/Keg/Sub.Keg	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	<i>Sasaran Program</i> Meningkatnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat dan berkeyakinan	Persentase Organisasi Masyarakat yang aktif	100%
	<i>Sasaran Kegiatan</i> Meningkatnya kapasitas kelembagaan organisasi masyarakat	Persentase organisasi kemasyarakatan yang terbina	100%
	<i>Sasaran Sub. Kegiatan</i> - Terpenuhinya Kebutuhan pendanaan organisasi masyarakat - Tersosialisasinya Isu-isu strategis ormas menjelang pilkada - Rapat Tim terpadu Pengawasan Ormas - Terverifikasinya usulan dana hibah ormas - Tersusunnya Rekomendasi terkait pemberdayaan dan pengawasan ormas - Terevaluasinya pelaporan organisasi kemasyarakatan	Jumlah ormas penerima dana hibah Jumlah anggota ormas yang mengikuti sosialisasi Jumlah laporan dari hasil pengawasan Organisasi/Kelompok masyarakat Persentase usulan dana hibah ormas yang di verifikasi Jumlah rekomendasi terkait pemberdayaan dan pengawasan ormas Jumlah ormas yang terevaluasi	4 Ormas 60 orang 1 laporan 100% 1 Rekomendasi 4 Ormas
	<i>Sasaran Program</i> Meningkatnya kapasitas kelompok masyarakat mengenai ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	persentase kelompok masyarakat yang meningkat kapasitasnya mengenai ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	60%
II	<i>Sasaran Kegiatan</i> Meningkatnya kualitas pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya terhadap masyarakat	Persentase kelompok masyarakat yang terbina ketahanan ekonomi	60%
	<i>Sasaran Sub. Kegiatan</i> - Tersosialisasinya kebijakan pemberdayaan ekonomi bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan pemberdayaan ekonomi bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif	60 orang
	<i>Sasaran Kegiatan</i> Meningkatnya kualitas pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya terhadap masyarakat - Tersosialisasinya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi masyarakat - Terevaluasinya hasil pembinaan dan pemberdayaan ekonomi, sosial dan budaya di kabupaten Kota	Persentase sekolah yang terbina ketahanan sosial dan budaya Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Jumlah laporan pelaksanaan	60% 60 orang 4 Laporan

PROGRAM/KEGIATAN/SUB.KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN

I Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Rp. 30,906,847,327 APBD

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Rp. 30,906.847,327
- Sub. Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. Rp. 30,490,898,877
 - Sub. Kegiatan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Rp. 164,878,450

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. Rp. 79,300,950
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Rp. 171,769,050

II Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Rp. 435,083,625 APBD

- 2. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Rp. 435,083,625
 - Sub. Kegiatan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah Rp. 56,710,200
 - Sub. Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah Rp. 132,957,300
 - Sub. Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah. Rp. 245,416,125

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. R. F. A. N., M.Si

Palu, 12 Juni 2024

KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI,
SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN

DODY SETIAWAN, S.STP., M.AP

**PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
BAKESBANGPOL PROV. SULTENG
TAHUN 2024**



**BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Erni, SH, M.A.P**

Jabatan : Ka. Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **I Wayan Yudana, AP, M.Si**

Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keungan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 12 Juni 2024

PIHAK PERTAMA

ERNI, SH, M.A.P



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Sub.Keg	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	- Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya bagi ASN Perangkat Daerah	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	102 lembar
	- Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi bagi ASN perangkat daerah	- Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	2 orang
	- Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket
	- Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket
	- Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen
	- Tersedianya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan
	- Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan
	- Tersedianya layanan telepon	- Jumlah Unit Kerja Yang Terpenuhi Kebutuhan Layanan Telepon	1 unit
	- Terpenuhinya Kebutuhan Air	- Jumlah Unit Kerja Yang Terpenuhi Kebutuhan Layanan Air	1 unit
	- Tersedianya Layanan Listrik	- Jumlah Unit Kerja Yang Terpenuhi Kebutuhan Layanan Listrik	1 unit
	- Tersedianya Layanan Internet	- Jumlah Unit Kerja Yang Terpenuhi Layanan Internet	3 unit
	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	- Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	1 paket
	- Tersedianya laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan

SUB.KEGIATAN

ANGGARAN

KETERANGAN

- Sub. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp.	52,254,600
- Sub. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp.	55,215,675
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	22,490,271
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	70,008,200
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.	45,400,000
- Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp.	59,000,000
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	355,706,385
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	112,752,000
- Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Rp.	141,653,933
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	31,420,000

SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



NUDANA, AP, M.Si

Palu 12 Juni 2024

KASUB. BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

ERNI, SH, M.A.P



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Moh. Arief Rakhman, SE., M.Si**
Jabatan : Ka. Sub. Bagian Keuangan dan Asset

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **I Wayan Yudana, AP, M.Si**
Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
I WAYAN YUDANA, AP, M.Si

Palu, 12 Juni 2024

PIHAK PERTAMA


MOH. ARIEF RAKHMAN, SE., M.Si

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Sub.Keg	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	- Terdistribusinya Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah ASN yang Terdistribusi Gaji dan Tunjangan	46 orang
	- Tersusunnya Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen
	- Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan
	- Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan
	- Tersusunnya Laporan hasil penilaian Barang Milik Daerah SKPD	- Jumlah Laporan hasil penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan
	- Tersusunnya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan
	- Tersedianya unit kendaraan dinas operasional atau lapangan	- Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 unit
	- Tersedianya unit Mebel	- Jumlah unit Mebel yang di sediakan	40 unit
	- Tersedianya unit peralatan dan mesin lainnya	- Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 unit
	- Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit
	- Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 unit

SUB.KEGIATAN

ANGGARAN

KETERANGAN

- Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 7,301,255,953
- Sub. Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 1,447,535,000
- Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 88,376,650
- Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 93,700,350
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Rp. 1,436,150
- Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 10,354,250
- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Rp. 440,192,000
- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Rp. 73,200,000
- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 176,961,600
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 657,550,000
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 39,260,000

SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK DAERAH
 PROVINSI SULAWESI TENGAH



Palu 12 Juni 2024
 KASUB. BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET

MOH. ARIEF RAKHMAN, SE., M.Si